Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Perilaku Koruptif di SMP Santo Vincentius Jakarta

Triny Srihadiati[1], Cerensia Blandina Ziliwu[2]
[1,2]Universitas Budi Luhur
e-mail: trinywinoto@budiluhur.ac.id[1], 2043500848@studentbudiluhur.ac.id [2]

Received: 14 February 2025, Revised: 12 March 2025 Accepted: 25 April 2025

DOI: https://doi.org/10.54099/jpma.v4i2.1323

Abstrak

Korupsi yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan karena berbagai lapisan masyarakat melakukan korupsi. Lapisan masyarakat tersebut terdiri dari pejabat pemerintahan, pegawai negeri sipil, masyarakat sipil, dan anak-anak sering melakukan korupsi secara sadar ataupun tidak sadar. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam cara untuk memberantas tindakan korupsi pada ranah pemerintahan. Namun, masih banyak kasus korupsi yang tidak bisa terkuak. Hal ini diakibatkan dari sikap lingkungan para koruptor yang menormalisasi korupsi terjadi dan bahkan ikut andil dalam melakukan korupsi. Oleh karena itu, Pendidikan Anti Korupsi sejak dini sangat dibutuhkan. Di Indonesia, kasus korupsi marak dilakukan oleh warga sipil yang menganggap hal yang dilakukan bukanlah korupsi. Pendidikan Anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi penerus yang memiliki karakter anti korupsi. Pendidikan Anti Korupsi dapat dimulai dari SD hingga Perguruan tinggi disesuaikan dengan tingkatan pendidikan. Sosialisasi yang dilakukan di SMP Santo Vincentius merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anti Korupsi berfokus pada bentuk-bentuk sikap koruptif di kalangan remaja dan sikap-sikap anti korupsi.

Kata kunci*: Pendidikan, Anti Korupsi, Perilaku Koruptif*

Abstract

Corruption in Indonesia is quite worrying because various levels of society commit corruption. These levels of society consist of government officials, civil servants, civil society, and children who often commit corruption consciously or unconsciously. The Indonesian government has taken various measures to eradicate corruption in the government. However, there are still many cases of corruption that cannot be solved. This is due to the attitude of the corruptors' environment, which normalizes corruption and even encourages them to commit corruption. Therefore, early Anti-Corruption Education is very much needed. In Indonesia, corruption cases are often carried out by civilians who consider what they are doing is not corruption. Anti-corruption education aims to create the next generation who have an anti-corruption character. Anti-corruption education can start from elementary school to college, according to the level of education. The socialization carried out at SMP Santo Vincentius is one form of anti-corruption education that focuses on forms of corrupt attitudes among teenagers and anti-corruption attitudes.

Keywords*: Education, Anti Corruption, Corrupt Behaviour*

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini masih berusaha untuk diberantas oleh pemerintah Indonesia. Tingginya tingkat korupsi baik yang terjadi di wilayah Indonesia membuat Indonesia gencar mencari solusi untuk mengatasinya. Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*. *Corruptio* berarti tindakan merusak atau tindakan menghancurkan. *Corruptio* juga bisa berarti kebusukan, keburukan, kebejatan,

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

ketidakjujuran, bisa disuap, tidak memilik moral, menyimpang dari kesucian, dan kata-kata menghina (Olivia, 2021).

Haryatmokon berpendapat. korupsi merupakan kapasitas dalam campur tangan karena jabatannya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi keuntungan dirinya (Dhevy Setya Wibawa, 2021). Pendapat dari Mubyarto korupsi merupakan persoalan dalam bidang politik yang lebih daripada masalah ekonomi yang berhadapan langsung dengan keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum terdidik, dan pegawai pada umumnya. Korupsi berakibat berkurangnya sokongan untuk pemerintah dari kelompok-kelompok tersebut (Putri, 2021).

Robert Klitgaard sendiri berpendapat, korupsi merupakan perbuatan yang berlawanan dari tugas-tugas resmi sebuah pejabat negara demi keuntungan kedudukan ataupun materi yang bersangkutan dengan individu atau kelompok tertentu, selainnya itu juga Robert Klitgaard melihat korupsi lebih terkhusus bagi pejabat negara yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi (Zeni Zaenal Mutaqin, 2020). Korupsi terdiri dari tujuh bentuk yaitu suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak kasus korupsi yang terjadi. Salah satu contoh adalah kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang didakwa menjalankan korupsi hingga 44,5 miliar. KPK resmi menjadikan Syahrul sebagai tersangka pada tanggal 13 Oktober 2023. Diduga beberapa bawahan Syarul ikut terlibat seperti Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Mentan Muhammad Hatta. Selain itu, KPK menduga Syahrul melakukan pungutan demi kebutuhan pribadinya (Nugroho, 2024). Selain kasus tersebut, ada kasus gratifikasi yang dilakukan oleh mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang akhirnya membawa dirinya mendapatkan putusan 14 tahun penjara beserta denda senilai Rp1 miliar. Rafael terbukti memperoleh gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Gratifikasi tersebut diterima melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali Internasional Cargo (CNN Indonesia, 2023).

Dari penjelasan mengenai korupsi, korupsi adalah perilaku yang merugikan pihak lain demi kepentingan individu ataupun golongan. Banyak upaya yang dilakukan untuk menekan peningkatan kasus korupsi baik di kalangan pemerintah maupun mahasiswa. Generasi muda saat ini mengetahui bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat menghawatirkan dan korupsi sendiri merupakan perbuatan yang melawan hukum. Namun, saat diminta melakukan perilaku anti korupsi, banyak dari kalangan mahasiswa yang enggan untuk melakukannya seperti datang tepat waktu, tidak menyontek, atau bahkan tidak menggelapkan uang orang tua (Dhevy Setya Wibawa, 2021).

Pendidikan Anti Korupsi atau PAK menjadi salah satu fondasi dalam memberantas bahaya korupsi sejak dini (Asmorojati, 2017). Karena jika tidak diajarkan dari dini, perilaku koruptif akan terbawa hingga dewasa dan ini menjadi cikal bakal dari para koruptor yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pendidikan anti korupsi sejak dini menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mengurangi perbuatan koruptif pada saat menjadi mahasiswa nanti.

Pendidikan Anti Korupsi atau PAK perlu ditanamkan semenjak dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sebab Pendidikan Anti Korupsi berpengaruh pada pertumbuhan psikologis anak. Jika semangat anti korupsi telah tertanam di setiap anak bangsa maka akan tercermin dalam tindakan setiap hari. Jika korupsi dapat dikurangi, maka pekerjaan untuk membangun negeri akan menjadi maksimal (Nuzus Sakinah, 2019). Dunia pendidikan sudah

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

sewajarnya mengakui bahwa pendidikan antikorupsi merupakan hal yang penting sehingga saat dewasa nanti anak-anak menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Nuzus Sakinah, 2019).

Selain itu, Pendidikan Anti Korupsi sejak dini dapat menetralisasi perilaku koruptif. Perilaku koruptif sendiri ialah sesuatu yang bersifat korupsi jadi perilaku koruptif adalah sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas, sikap, dan wawasan seseorang yang membuat ia sendiri terjerat dalam kegiatan korupsi. Contoh dari perilaku koruptif antara lain plagiarisme, berbohong, menyontek, memberikan uang suapan, dan lain sebagainya (Putri, 2021).

Perilaku koruptif sendiri dapat menjadi akar dari terjadinya korupsi. Korupsi sendiri memberikan dampak negatif. Beberapa dampak negatif dari korupsi adalah masyarakat tidak lagi percaya pada hukum, supremasi hukum, pendidikan, serta penurunan kualitas hidup masyarakat yang akses infrastruktur dan kebutuhan masyarakatnya tidak terpenuhi sepenuhnya. Selain itu terdapat pula dampak masif yang dapat dirasakan yaitu pada bidang ekonomi, sosial, kerusakan lingkungan, dan kemelaratan masyarakat sebagai konsekuensi dalam bidang birokrasi pemerintah, dampak dari segi keamanan suatu negara (Indra Kristian, 2022).

Maka dari itu, perlu adanya pendidikan moral sejak dini yang dapat menjadi fondasi bagi para penerus bangsa agar ke depan anak-anak tersebut tidak mudah tergiur oleh praktik korupsi dan menjadi dapat orang yang bermoral, berintegritas tinggi, serta menyadari bahwa perbuatan korupsi itu merugikan orang lain (Indra Kristian, 2022). Seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3), pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (Nurdyansyah, 2015). Oleh karena itu, pendidikan moral dan karakter baiknya dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena berbagai permasalahan sosial seperti korupsi diharapkan pendidikan mampu memberi solusi atau mencegah permasalahan tersebut melalui pendidikan anti-korupsi yang menuntut siswa untuk menyesuaikan atau memperbaiki aturan-aturan yang ditetapkan (Nurdyansyah, 2015).

Pendidikan Anti Korupsi diberikan untuk menciptakan kepribadian dan sikap kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan adil. Pendidikan Anti Korupsi diharapkan mampu membawa perubahan bagi setiap individu dan menjadi pengetahuan kepada siswa agar dapat menjadi penguat untuk menjauhi tindakan korupsi (Setiawan, 2023).

Pendidikan Anti Korupsi yang selanjutnya akan di sebut dengan singkatan PAK mempunyai tekat untuk memberikan pengetahuan yang terpadu dan terbimbing untuk membendung kerugian negara yang diakibatkan karena korupsi. PAK juga memberikan harapan adanya respon baik dari masyarakat untuk menyuarakan tanggapannya perihal korupsi dan membentuk kesadaran publik mengenai tindakan yang mengarah ke arah korupsi (Kadir, 2018).

2. METODE

Teknik pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini adalah dengan metode observasi dan pembelajaran dengan sosialisasi. Observasi adalah kemampuan manusia untuk menggunakan panca inderanya untuk memperoleh data atau informasi,. Teknik observasi digunakan untuk menyelidiki ataupun untuk mengetahui tingkah laku nonverbal. Kunci dari keberhasilan observasi adalah pengamatan dari tim pengabdian masyarakat (Makbul, 2021). Langkah awal dalam melakukan observasi yang dimaksud adalah

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

menghubungi dan mendatangi langsung SMP Santo Vincentius Kota Jakarta Timur serta mengamati keadaan lingkungan di sekitar kawasan pembelajaran tersebut.

Langkah berikutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan memberi materi pendidikan anti korupsi dan menekan perilaku koruptif di kalangan remaja. Sosialisasi dilakukan langsung di lingkungan SMP Santo Vincentius Kota Jakarta Timur dengan materi yang disesuaikan dengan umur siswa SMP. Adapun Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tahap 1: Pembuatan Materi Mengenai Pendidikan Anti Korupsi dan Cara Mencegah Tindakan Koruptif sejak dini di kalangan remaja

   Tahap awal merupakan tahapan untuk mengelola data-data yang didapat melalui jurnal, skripsi, dan web mengenai Pendidikan Anti Korupsi serta cara mencegah perilaku koruptif di kalangan remaja. Tim pengabdian masyarakat juga merancang bentuk sosialisasi dan juga materi yang akan disampaikan serta pembicara yang akan menyampaikan materi yang dirancang oleh tim pengabdian masyarakat.

2. Tahap 2: Proses Sosialisasi Kegiatan

   Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi tentang implementasi pendidikan anti korupsi dalam upaya mencegah perilaku koruptif di kalangan remaja kepada siswa dan siswi SMP Santo Vincentius Kota Jakarta Timur. Sosialisasi ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan kejujuran di kalangan remaja, pengertian dari korupsi, bentuk-bentuk perilaku koruptif yang mungkin saja saat ini telah dilakukan oleh remaja-remaja di Indonesia, serta bagaimana cara untuk mencegah perilaku koruptif tersebut agar tidak terbawa hingga dewasa.

3. Tahap 3: Evaluasi Kegiatan

   Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat telah selesai melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi SMP Santo Vincentius Kota Jakarta Timur, tim pengabdian masyarakat melakukan evaluasi dengan menyebarkan kuesioner kepada siswa siswi sekolah tersebut. Kuesioner berisi pemahaman mengenai materi yang disampaikan saat sosialisasi

4. Tahap 4: Analisis hasil kegiatan

   Tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah dan solusi dari masalah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi, Remaja Bijak, Anti Korupsi berlangsung pada tanggal 17 Januari 2025 dan berlangsung di lingkungan SMP Santo Vincentius Jakarta Timur, sesuai dengan Gambar 1. Kegiatan sosialisasi tersebut membahas mengenai Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi serta perilaku koruptif yang ada di kalangan remaja terkhusus siswa SMP. Korupsi sendiri merupakan perilaku yang melanggar hukum dan kegiatannya dapat merugikan negara. Selain itu, korupsi bisa berupa penyelewengan jabatan dan merugikan keuangan negara.

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

Pendidikan Anti Korupsi sendiri merupakan cara preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi atau PAK dapat mulai diajarkan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Saat ini, Pendidikan Anti Korupsi sendiri masih belum menjadi pendidikan wajib di sekolah ataupun Perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Gambar 1. Proses Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi

Sosialisasi yang di adakan di SMP Santo Vincentius Jakarta membahas pentingnya PAK atau Pendidikan Anti Korupsi dalam lingkungan sekolah. Jika siswa SMP Santo Vincentius memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai apa itu korupsi dan dampaknya bagi negara dan diri sendiri, angka tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun diharapkan dapat berkurang. Selain itu juga sosialisasi ini dilakukan agar perilaku koruptif yang ada di kalangan remaja seperti menyontek, datang terlambat, tidak jujur, tidak disiplin, tidak bertanggungjawab, tidak mandiri, dan lain sebagainya dapat dikurangi sedikit demi sedikit sehingga ke depan siswa SMP Santo Vincentius dapat menjadi generasi emas dengan sikap anti korupsi. Sosialisasi ini dilakukan juga selain untuk siswa. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu guru-guru untuk lebih memahami sikap anti korupsi dan cara mengatasinya di lingkungan remaja, khususnya siswa SMP Santo Vincentius.

Gambar 2. Foto Bersama Peserta Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

Dalam kegiatan ini, tim pengabdian masyarakat juga membagikan kipas tangan dan *goodie bag* dengan desain "Stop Korupsi" kepada siswa SMP Santo Vincentius dan juga guru yang mendampingi sebagai sarana untuk mengajak generasi muda Indonesia untuk berhenti melakukan tindakan korupsi dan menjadi generasi emas anti korupsi dan bebas perilaku koruptif. Gambar 2 menunjukkan foto kegiatan yang dilakukan.

Gambar 3. Desain Kipas Tangan

Desain kipas pada Gambar 3 memperlihatkan tangan yang menolak menerima uang dengan tambahan kata-kata "stop korupsi" dan slogan sosialisasi yang dilakukan "Remaja Bijak, Anti Korupsi". Slogan ini dipilih karena untuk menciptakan Indonesia bebas korupsi, Indonesia terlebih dahulu harus menciptakan remaja yang paham korupsi, mengetahui bentuk-bentuk perilaku korupsi, hukum yang mengatur korupsi namun bijak menyikapinya dalam artian remaja yang paham korupsi memiliki sikap anti korupsi yang tertanam sejak dini, dan dapat dipertahankan hingga dewasa nanti.

Sosialisasi yang dilaksanakan memuat beberapa permasalahan perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijabarkan oleh narasumber dari ICW yakni Dicky Anandya perbuatan yang ternyata perbuatan korupsi adalah menyontek, mengambil uang kembalian tanpa memberitahukannya terlebih dahulu, dan memalak teman. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan oleh tim pengabdian masyarakat. Tim pengabdian masyarakat menambahkan perilaku koruptif lainnya berupa menyontek, terlambat, bolos, dan berbohong. Meskipun tampak sederhana, perbuatan-perbuatan tersebut dapat membawa perbuatan korupsi yang lebih besar. Oleh karena itu, narasumber dari ICW mengemukakan peran orang muda untuk mencegah korupsi dengan cara merawat kejujuran dan memperkaya pengetahuan bukannya memperkaya materi diri sendiri. Selain itu, tim pengabdian masyarakat juga menjabarkan beberapa nilai anti korupsi yaitu bertanggung jawab, disiplin, jujur, kepedulian, mandiri, dan bekerja keras. Dengan menanamkan sikap-sikap yang telah dijabarkan tersebut, siswa SMP Santo Vincentius diharapkan dapat menjadi pribadi yang berintegrasi dan anti korupsi sehingga ketika dewasa nanti tindakan korupsi dapat dihindari walaupun di lingkungan tempat bekerja atau bergaul merupakan tempat yang menormalisasi tindakan korupsi. Dengan karena pengendalian diri yang dimiliki sejak remaja, mereka diharapkan dapat menghindari tindakan korupsi.

Gambar 4 menunjukkan data *Pre test* dan *Post test* yang tim pengabdian masyarakat sebarkan kepada siswa di SMP Santo Vincentius dengan usia responden 14-16 tahun (di bawah

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

umur) dan total keseluruhan responden adalah 30 orang yang merupakan siswa kelas 9 SMP Santo Vincentius.

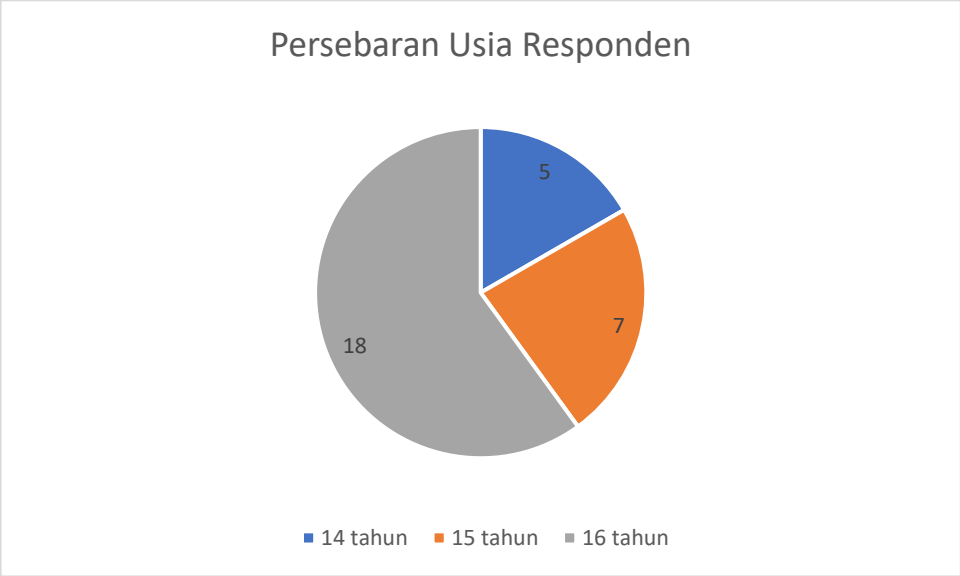

Gambar 4. Usia Responden

A. Data *Pre Test* Pendidikan Anti Korupsi

Pre Test adalah test yang dilakukan sebelum sosialisasi dilaksanakan responden berjumlah 30 orang yang semuanya hadir pada saat sosialisasi berlangsung. Pre tes dilakukan untuk mengetahui informasi terkait apakah siswa SMP Santo Vincentius pernah mendapatkan pendidikan anti korupsi sebelum sosialisasi dilaksanakan, berikut adalah data yang didapatkan dari hasil *pre test* siswa SMP Santo Vincentius Jakarta Timur.

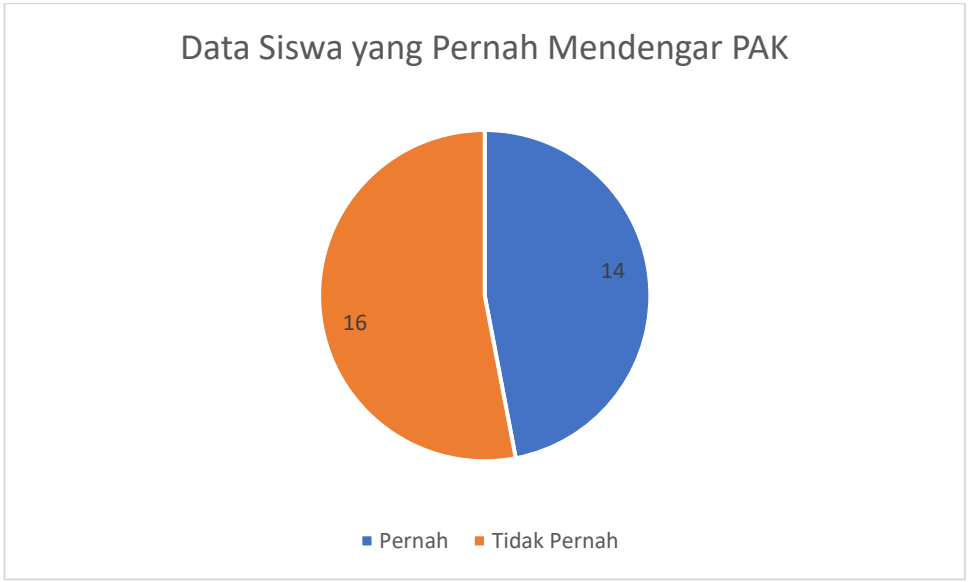

Gambar 5. Perbandingan Siswa yang Pernah Mendengar PAK

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

Gambar 5 menunjukkan data siswa yang pernah atau tidak pernah mendengar Pendidikan Anti Korupsi dan perilaku koruptif sebelum sosialisasi dilaksanakan. Terlihat lebih dari setengah siswa tidak pernah mendengar pendidikan anti korupsi sebelum sosialisasi dilakukan, siswa yang pernah mendengar pendidikan anti korupsi kebanyakan membaca melalui buku atau platform berita *online* tapi tidak pernah mendengarkan langsung dari pendidik.

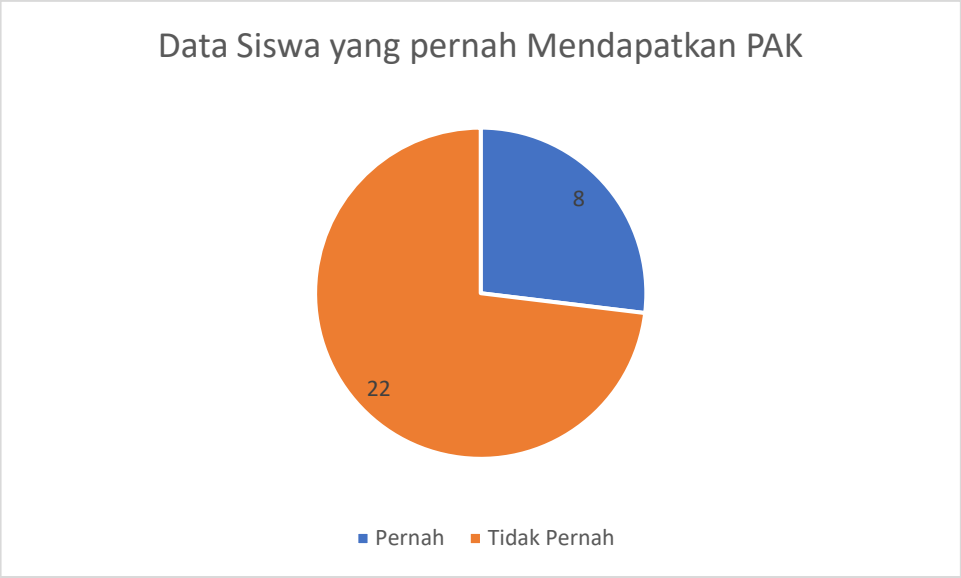

Gambar 6. Diagram Perbandingan Siswa yang Pernah Mendapat PAK

Gambar 6 menunjukkan data siswa yang sudah pernah atau belum pernah mendapatkan pendidikan anti korupsi, banyak dari siswa di SMP Santo Vincentius yang belum pernah mendapatkan pendidikan Anti Korupsi sebelumnya. Siswa yang sudah pernah mendapatkan Pendidikan Anti Korupsi mendapatkan pendidikan anti korupsi di luar sekolah baik di gereja atau seminar di luar sekolah. Banyak siswa yang pernah mendengar Pendidikan Anti Korupsi dengan porsi sedikit karena rata-rata hanya kebanyakan siswa mendapatkan informasi melalui buku dan pendidikan anti korupsi bukan pendidikan yang formal di kurikulum sekolah.

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

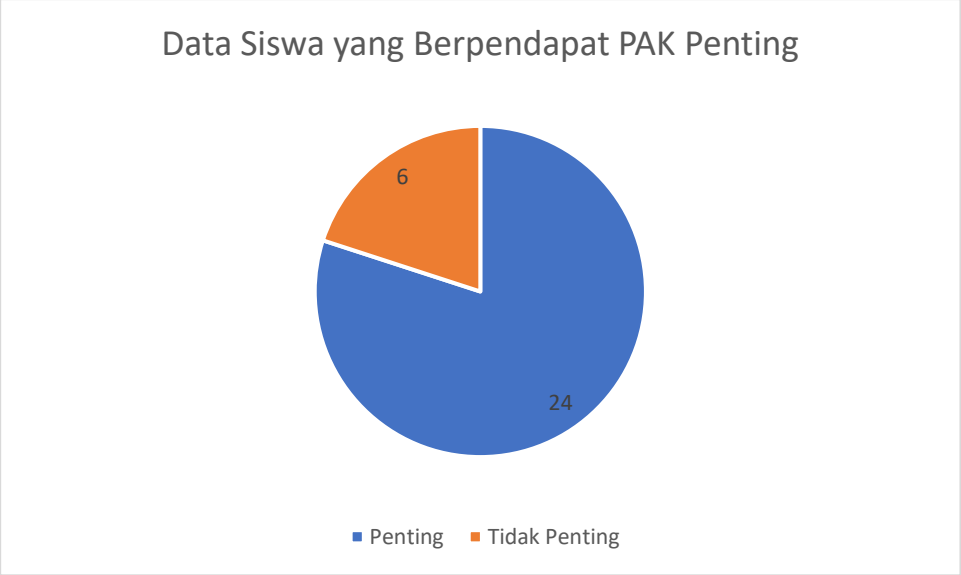

Gambar 7. Diagram Perbandingan Siswa yang Berpendapat PAK penting

Gambar 7 menunjukkan data siswa yang berpendapat Pendidikan Anti Korupsi penting dalam pembelajaran sehari-hari sebelum sosialisasi dilaksanakan. Banyak siswa yang beranggapan bahwa Pendidikan Anti Korupsi tidak begitu penting dalam pendidikan sehari-hari. Siswa yang beranggapan pendidikan anti korupsi tidak penting beralasan bahwa pendidikan anti korupsi tidak ada di mata pelajaran yang saat ini mereka pelajari sehingga mereka belum terlalu mengerti konsep dari pendidikan anti korupsi itu sendiri. Sedangkan siswa yang berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi itu penting menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi penting untuk membina anak-anak, remaja hingga orang dewasa agar tidak bertindak korupsi penting bagi para siswa yang ingin menjadi diplomat, abdi negara, atau pegawai negeri sipil.

Gambar 8. Data Perbandingan Siswa yang Mengetahui Perilaku Koruptif

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

Gambar 8 menunjukkan data siswa yang mengetahui atau tidak mengetahui terkait perilaku koruptif sebelum sosialisasi dilaksanakan. Banyak siswa yang kurang paham mengenai perilaku koruptif. Beberapa dari siswa juga menganggap perilaku koruptif adalah perilaku yang ada untuk mencegah tindakan korupsi atau perilaku yang berbanding terbalik dengan tindakan korupsi. Siswa yang mengetahui perilaku koruptif menjelaskan bahwa perilaku koruptif adalah tindakan curang, tidak disiplin, dan sikap seseorang yang tidak bertanggung jawab.

B. Data *Post Test* Pendidikan Anti Korupsi

Post test adalah test yang dilakukan setelah kegiatan sosialisasi berlangsung. Responden berjumlah 30 orang yang keseluruhannya adalah siswa SMP Santo Vincentius. *Post test* ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa SMP Santo Vincentius benar-benar memahami apa itu Pendidikan Anti Korupsi dan juga perilaku korupsi. Selain itu juga tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah sosialisasi yang dilakukan berhasil atau tidak.

Gambar 9. Diagram Perbandingan Data Siswa yang Berpendapat PAK Diperlukan

Gambar 9 menunjukkan data siswa yang berpendapat Pendidikan Anti Korupsi diperlukan dalam pembelajaran sehari hari setelah sosialisasi dilaksanakan, terlihat lebih dari setengah siswa setuju bahwa pendidikan anti korupsi dibutuhkan atau diperlukan dalam pembelajaran sehari-hari. Siswa SMP Santo Vincentius beralasan bahwa pendidikan anti korupsi penting untuk membentuk moral seseorang walaupun tidak bercita-cita menjadi diplomat ataupun abdi negara.

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

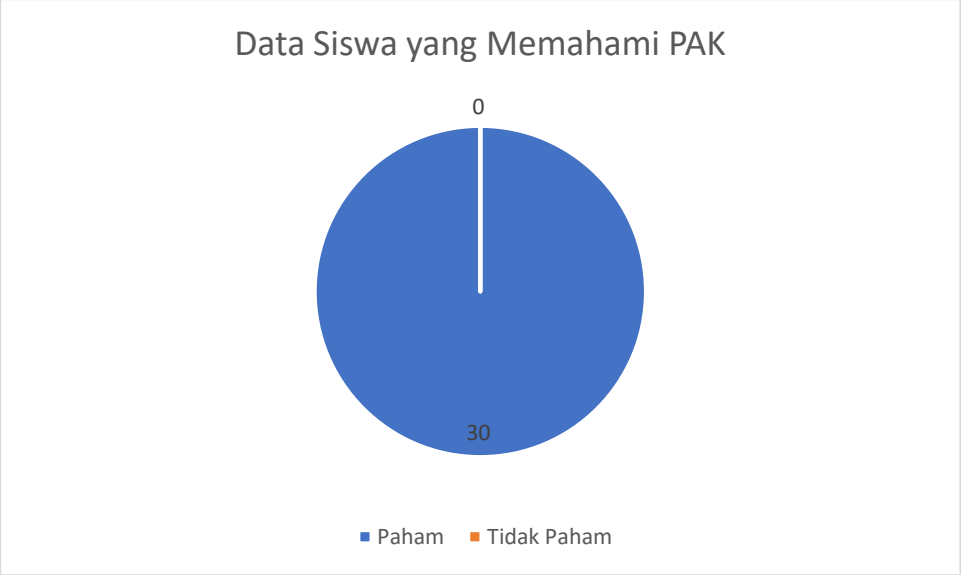

Gambar 10. Data Perbandingan Siswa yang Memahami PAK

Gambar 10 menjuakkan data siswa yang mengetahui atau tidak mengetahui mengenai Pendidikan Anti Korupsi setelah sosialisasi dilaksanakan. Setelah sosialisasi dilaksanakan, seluruh siswa yang sudah dapat mengerti apa yang dimaksud dengan Pendidikan Anti Korupsi. Siswa SMP Santo Vincentius berpendapat bahwa Pendidikan Anti Korupsi merupakan pendidikan untuk membentuk moral dan sikap anti korupsi dalam kehidupan seseorang agar ke depan tidak menjadi seorang koruptor ataupun tidak melakukan tindakan korupsi.

Gambar 11. Data Perbandingan Siswa yang Mengetahui Perilaku Koruptif

Gambar 11 menunjukkan data siswa yang mengetahui atau tidak mengetahui Pendidikan Anti Korupsi setelah sosialisasi dilaksanakan. Lebih dari setengah siswa sudah paham mengenai perilaku koruptif. Siswa SMP Santo Vincentius menjelaskan bahwa

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

perilaku koruptif adalah perilaku tidak bertanggungjawab, tidak disiplin, egois, tidak berempati, dan bahwa perilaku-perilaku yang terdapat di kehidupan mereka sehari-hari merupakan perilaku koruptif seperti menyontek, terlambat, bolos ataupun tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Gambar 11. Data Perbandingan Siswa yang Mengetahui Dampak Korupsi

Gambar 11 menunjukkan data siswa yang mengetahui dampak korupsi setelah sosialisasi dilaksanakan. Dari data yang diberikan, seluruh siswa SMP Santo Vincentius memahami dampak dari korupsi setelah sosialisasi dilakukan. Siswa dapat menjelaskan beberapa dampak buruk dari tindakan korupsi seperti ekonomi negara yang tidak stabil, infrastruktur yang tidak merata, dan kerugian keuangan negara. Selain itu, siswa SMP Santo Vincentius menjadi lebih tertarik membahas korupsi yang terjadi di Indonesia terkhusus korupsi yang tidak terlihat di media. Mereka juga berharap agar pendidikan anti korupsi bisa menjadi langkah yang efektif untuk mencegah tindakan korupsi.

4. KESIMPULAN

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia hingga saat ini. Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah tindak pidana korupsi. Selain hukum yang terus diperbaharui dan penanganan yang semakin diperketat, upaya pencegahan dan sosialisasi tentunya dibutuhkan agar masyarakat memilih pemahaman mengenai tindak pidana korupsi sehingga ditahun tahun yang akan datang diharapkan angka tindak pidana dapat berkurang. Salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan non formal berupa pendidikan anti korupsi sedari dini mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang bahasannya disesuaikan dengan umur dan tingkat pendidikan serta perlu ditanamkannya pengertian mengenai perilaku koruptif agar anak-anak dapat menjadi pribadi yang memahami korupsi dan bersikap anti korupsi kelak saat mencapai umur dewasa. Sosialisasi yang dilakukan di SMP St. Vincentius sebagai bentuk pendidikan non formal dari pendidikan anti korupsi mendapatkan respons positif baik dari siswa maupun guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Sebelum sosialisasi dilakukan, siswa SMP St. Vincentius masih ada yang belum mengetahui mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi dan tidak mengetahui mengenai perilaku koruptif. Setelah sosialisasi dilakukan, siswa

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.

Vol.4 No.2 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 67-79

SMP St. Vincentius mengerti dan mengetahui pentingkan pendidikan anti korupsi serta bentuk-bentuk perilaku koruptif beserta dampaknya bagi masa depan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. URECOL.

CNN Indonesia. (2023, Desember 11). CNN Indonesia. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231211165853-12-1035798/rafael-alundituntut-14-tahun-penjara-di-kasus-gratifikasi-dan-tppu

Dhevy Setya Wibawa, M. A. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. Muqddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi, 2(1).

Indra Kristian, A. T. (2022). Etika Birokrasi sebagai Pencegahan Perilaku Koruptif.

Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi.

Makbul, M. (2021). Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.

Nugroho, M. R. (2024, Februari 20). CNBC Indonesia. Retrieved from CNBC Indonesia News: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240220125038-4-515963/mantanmentan-syl-bakal-didakwa-lakukan-korupsi-rp445-m

Nurdyansyah. (2015). Modal Social Reconstruction Sebagai Pendidikan Anti-Korupsi Pada Pelajaran Tematik di Madrasah Ibtida'yah Muhammadiyah 1 Pare. Jurnal Pendidikan dan Keislaman, 13-23.

Nuzus Sakinah, N. B. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini.

Olivia. (2021, November 9). DetikEdu/detikPedia. Retrieved from DetikNews: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-caramemberantasnya

Putri, D. (2021). Korupsi dan Perilaku Koruptif. Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 5.2.

Setiawan, A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran.

Zeni Zaenal Mutaqin. (2020). Antikorupsi dan Integritas. Bandung: Media Sains Indonesia.

© 2025 ADPEBI Publications. All Rights Reserved.